

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### 3.1 Pengertian Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)

Kesenjangan digital yang dikemukakan oleh Dewan dkk (2005) sebagai ketidakmampuan individu dalam merasakan manfaat dari teknologi informasi karena kurangnya akses serta kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Menurut pendapat Kadiman (2006) kesenjangan terjadi akibat akses teknologi terbatas dikarenakan biaya peralatan dan mahalnya operasional, sedangkan OECD (2001), mendefinisikan kesenjangan digital sebagai berikut:

*“the gap between individuals, households, bussiness and geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their oppoertunities to access information and communication technologies (Its) and to their use of the internet for a wide variety of activities”.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan terjadi antara tingkat individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografi yang tingkat sosial ekonominya berbeda berdasarkan kesempatan mereka untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi (*Organisation for Economic CoOperation and Development*, 2001).

Pengertian kesenjangan digital menurut Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* didefinisikan sebagai ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang kesenjangan digital

yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi (Inpres, 2003).

Menurut Zulkarimen & nasution (2007) kesenjangan digital merupakan keadaan dimana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses internet melalui infrastruktur teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau oleh teknologi tersebut Sementara menurut Donny (2012), istilah kesenjangan digital terbentuk untuk menggambarkan kesenjangan dalam memahami, kemampuan, dan akses teknologi, sehingga muncul istilah “mempunyai” sebagai pemilik atau pengguna teknologi dan “tidak mempunyai” yang berarti sebaliknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesenjangan digital merupakan kesenjangan (gap) antara individu, rumah tangga, bisnis, (atau kelompok masyarakat) dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penggunaan internet untuk beragam aktivitas.

### **3.2 Konsep Kesenjangan Digital**

Menurut Chen dan Wellman, konsep kesenjangan digital adalah kesenjangan dari faktor pengaksesan dan penggunaan internet, yang dibedakan oleh status sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat hidup, etnik, dan lokasi geografi (Wenhong, et al., 2003). Sedangkan menurut Bridges, kesenjangan digital dinilai dari jumlah pengguna atau komputer, akses infrastruktur, kemampuan penggunaan, pelatihan, isi yang relevan, sektor teknologi informasi (seberapa

besar integrasi sektor TIK pada industri yang ada), kemiskinan, dan batas demografi (geografi, ras, usia, agama, jenis kelamin, dan kecacatan).

Konsep Chen dan Wellman didukung juga oleh konsep Choi yang menyatakan bahwa tidak hanya pada kesenjangan akses terhadap TIK namun juga pada kesenjangan kemampuan dalam menggunakan TIK (Choi, et al., 2004). Berdasarkan Kemly Camacho (Camacho, 2005), konsep kesenjangan digital fokus pada hal sebagai berikut:

1. Fokus pada Infrastruktur, yaitu berdasarkan perbedaan antara individu yang memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet dengan individu yang tidak memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet;
2. Fokus pada pencapaian kecakapan TIK, yaitu antara individu yang berusaha - mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan dengan individu yang tidak memiliki upaya mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan;
3. Fokus pada pemanfaatan sumberdaya, yang didasarkan pada keterbatasan individu untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia di website melalui internet.

### **3.3 SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking The Information Society*)**

SIBIS merupakan proyek komisi Eropa yang berusaha menganalisis serta membandingkan berbagai indikator-indikator kesenjangan digital yang berbeda (SIBIS, 2003). Proyek dari SIBIS sudah berjalan dari awal bulan Januari 2001 hingga bulan September tahun 2003. Adapun tujuan keseluruhan dari SIBIS yaitu mengembangkan indikator-indikator yang digunakan untuk memonitor

perkembangan menuju masyarakat informasi (Vehovar, et al., 2006). Dengan berlandaskan pada tujuan tersebut maka SIBIS fokus pada akses serta pemanfaatan dasar seperti kesiapan internet, kesenjangan digital dan keamanan informasi.

Instrumen SIBIS mengkombinasikan tiga tingkat dasar dalam pengembangan masyarakat informasi yaitu kesiapan, intensitas serta dampaknya (Yulfitri, 2008). Indikator-indikator SIBIS telah diuji serta dilaksanakan survey perbandingan pada 15 anggota Negara bagian, seperti Amerika Serikat, Swiss dan EU Accession countries, Bulgaria, dan Negara bagian yang lain. Pada survey tersebut mengumpulkan serta mempresentasikan data untuk tujuan perbandingan antara negara bagian Eropa. Dan untuk pertama kalinya perbandingan antar Negara yaitu antara Eropa dengan Amerika Serikat dengan menggunakan indikator yang sama persis dan pada saat yang bersamaan (SIBIS, 2003). Barzilai (2006) menyatakan bahwa metode SIBIS memiliki kekurangan dalam pengukuran kesenjangan digital terhadap kesenjangan ekonomi serta sosial (Barzilai-Nahon, 2006).

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada instrumen *SIBIS General Population Survey (SIBIS GPS)* yang merupakan instrumen untuk mensurvei lingkup individu (warga negara). Indikator ini dikembangkan khusus untuk mengukur kesenjangan yang terjadi di antara negara Uni Eropa, sehingga indikator dan model pengukuran disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia.

Aspek-aspek dalam instrumen SIBIS GPS yang akan digunakan untuk menganalisis kesenjangan digital masyarakat di Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut:

**A. Aspek Ketersediaan Akses TIK**

Aspek ketersediaan akses TIK menjadi salah satu penyebab kesenjangan digital yang dibedakan antara individu yang dapat mengakses internet dengan individu yang tidak dapat mengakses internet. Ketersediaan akses TIK dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu penggunaan peralatan yang lebih baru untuk mengakses internet (telepon genggam, TV digital) dan pengguna yang memiliki akses internet lebih dari satu lokasi (di rumah, di kantor) (Yulfitri, 2008).

**B. Aspek Pemanfaatan TIK**

Pemanfaatan TIK menjadi salah satu aspek yang akan digunakan untuk menganalisis kesenjangan digital karena berkaitan dengan aspek ketersediaan akses TIK. Setelah tersedianya akses selanjutnya yaitu bagaimana pengguna dapat memanfaatkan akses tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Yulfitri, 2008). Memanfaatkan TIK menjadikan pekerjaan lebih mudah dan dapat mengembangkan kinerja pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien.

**C. Aspek Tingkat Kemampuan TIK**

Dengan tersedianya akses TIK maka dibutuhkan kemampuan pengguna dalam mengakses dan mengikuti perkembangan TIK sehingga pemanfaatan akses TIK dapat optimal sesuai yang diharapkan. Karena dengan banyaknya individu yang memiliki tingkat kemampuan TIK yang tinggi maka dapat mengurangi kesenjangan digital (Yulfitri, 2008).

#### **D. E-Government**

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan teknologi informasi dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan teknologi informasi untuk proses terintegrasi. Tipe penerapan *e-government* menurut Seifert dan Bonham (2003) ada empat yaitu *government to citizens (G2C)*, *government to government (G2G)*, *government to bussiness (G2B)*, dan *government to Employees (G2E)*.

Konsep *e-government* adalah contoh dari implementasi praktek *e-business* dalam bidang pemerintahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam filsafat manajemen menyebabkan organisasi yang bergerak dibidang sektor publik berpikir dan bertindak seperti oragnisasi-organisasi privat (Martin, et al., 2006).

Penelitian ini menggunakan tipe penerapan *Government to Citizens* yang merupakan suatu fasilitas untuk interaksi antara warga negara dengan pemerintah, interaksi ini merupakan tujuan utama dari *e-government* yang memungkinkan warga negara mendapatkan pelayanan pemerintah dengan cepat melalui akses informasi publik yang disediakan pemerintah dalam situs tertentu.

#### **E. Demografi**

Menurut Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (1959) mengusulkan definisi demografi adalah sebagai berikut:

*“Demographic is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of a such changes which maybe identified as natality, territorial movement (migration), and social mobility (changes of states)”.*

Yang diartikan sebagai mempelajari jumlah, persebaran, territorial, komposisi penduduk dan perubahannya serta sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena migrasi dan perubahan status. Penelitian ini menggunakan aspek demografi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

